

- Hadikusuma, H. (2005). *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Mandar Maju.
- Hasan, M. A. (2006). pedoman hidup berumah tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja, 122(2).
- Hatta, M., & Yustanti, D. E. (2010). Hukum acara perdata dalam tanya jawab. Yogyakarta: Liberty.
- Idris Ramulyo, H. P., Kewarisan, H., & Agama, H. A. P. (2006). Zakat menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, K. B. B. (2005). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jaya, D. P. (2020). Hukum Kewarisan Di Indonesia. In Zara Abadi.
- Kuncoro, W. (2010). Solusi cerdas menghadapi kasus keluarga. Jakarta: Raih Asa
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media.
- Laazula, I. (2013). *Menguat Stigma Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT Di Indonesia*. Arus Pelangi.
- Mahjuddin, H. (2003). Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.

Moch, I. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. *Surabaya: Revka Petra Media*,
h, 169.

Mustofa Bisri, A. K. H. (2005). *Fikih Keseharian Gus Mus*. Khalista.

Sayuti, T. (2007). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Pres. Cet,5.

Shaleh, W. K. (1982). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shiel, W. C., & Stoppler, M. C. (2010). Kamus Kedokteran Webster's New World.
Jakarta: PT. Indeks.

Soerjowinoto, P. (2018). Ilmu Hukum Suatu Pengantar. CV. Garuda Mas Sejahtera.

Suyuthi, A., Jalaluddin, I., & Nadjih, A. (1954). *Shahih Al-Jami' Ash Shaghir Jilid*
2. Mustafa Al Babi Al Halabi wa Auladuh.

United Nations. (1998). Handbook on Civil Registration and Vital Statistics
Systems Computerization: Studies in Methods Series F, No. 73.

Usman, R. (2006). Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di indonesia.

Zamroni, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia.
Media Sahabat Cendekia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
Rujuk

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu

Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Pencatatan Nikah

Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 tentang Penggantian dan

Penyempurnaan Jenis Kelamin

Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/2013/PN Ung

Penetapan Pengadilan Negeri Wates Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Wat

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN YK

C. Skripsi

Agususanto, A. (2019). Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Aliya, V. (2012). Status Hukum Transeksual Dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Skripsi*.

Feronika, T. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum Yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/Pn.Kdl). *Skripsi*.

Hapsari, G. R. (2012). Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Seorang Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam. *Skripsi*.

Maulidina, N. W. (2015). Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya. *Skripsi*.

Ramadina, I. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Transgender (Transwomen/Waria Analisis Kasus) di Kota Makassar. *Skripsi*.

D. Jurnal

Agususanto, Andiko, T., & Fahima, I. (2020). Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Qiyas*, 5(1), 7–14.

- Astutik, Y., & Nugraheni, A. S. C. (2020). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 331. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48428>
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17-31.
- Barmawi, B., & Silmi, M. (2016). Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh. *Jurnal Psikoislamedia*, 1(2), 372–384. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i2.923>
- Belo, Y. (2021). Kajian Dan Evaluasi Terhadap Perilaku Transgender Dari Perspektif Etika Kristen. *Jurnal Luxnos*, 7(1), 90–104. <https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.147>
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138–167. <https://doi.org/10.31078/jk1817>
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367-384.
- Dwi Harti, S. (2020). Pentingnya Pelayanan Pastoral Terhadap Korban LGBT. *Jurnal Luxnos*, 6(2), 193–202. <https://doi.org/10.47304/jl.v6i2.55>
- Falabiba, N., W, A., & A, M. (2014). Transgender Dan Permasalahannya. *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.

- Gibtiah. (2014). Studi Perbandingan tentang Khunsadengan Transseksual dan Transgender. *Intizar*, 20(2), 349–362.
- Hanif, M. F., Yefrizawati, H. M. H. T., & Azwar, T. K. D. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(2), 94–114.
<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v1i2.151>
- Harti, S. D. (2020). Pentingnya Pelayanan Pastoral Terhadap Korban Lgbt. *Jurnal Luxnos*, 6(2), 193-202.
- Jasruddin, J., & Daud, J. (2017). Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 19–28.
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.509>
- Judiasih, S. D., Salim, E. F., Hidayat, A. P. A., Kurniawan, C., Meirizka, R., & Anandini, F. (2020). Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 210-225.
- Jumardin, J., & Halimang, S. (2021). Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur). *Fawa'id: Sharia Economic Law Review*, 3(1).
- Karim, H. M. (2017). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 185-209.

- Kurniawati, M., Widanarti, H., & Aminah. (2017). Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–19.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/17431/16684>
- Lestari, I., & Sefitri, S. (2016). Konseling Bagi Populasi Transgender. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(1).
- Lianto, Z. N. (2018). Akibat Hukum “Operasi Ganti Kelamin” Terhadap Keabsahan Perkawinan. In *Arena Hukum* (Vol. 11, Issue 2, pp. 246–262).
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.3>
- M. Rasyid, L., & Herinawati. (2015). Pengantar Hukum Acara Perdata. In *Unimal Press* (Vol. 13, Issue 1).
- Mansur, S. I. (2017). Homoseksual dalam perspektif agama-agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(01), 21-60.
- Mauboy, A., & Eveline, S. (2019). Pemahaman Pernikahan Kudus Suku Dawan Ditinjau Dari Kejadian 1: 27-28. *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso*, 4(2), 23-32.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.

- Perwira, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 74-78.
- Purnama, I. W., & Tarigan, S. A. (2011). Tinjauan Etika Kristen Terhadap Operasi Transeksual. *Jurnal Jaffray*, 9(1), 109-130.
- Purnomo, B. P., Istiqomah, L., & Adiwibowo, Y. (2018). Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 7.
- Rohmawati. (2016). Perkawinan Lesbian, Gay, Bisseksual, Dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *AHKAM*, 4(2), 305–326.
- Salsabila, A. L. H., Fatahullah, & Wagian, D. (2023). Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(2), 304–314.
- Shabah, M. A. A. (2021). Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 15-25.
- Sihombing, P., & Andika, D. (2017). Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 1, 164987.
- Sutrisno, J. (2019). Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual. *Badamai Law Journal*, 4(1), 69. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.8288>

Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 15(1), 12–22.

Yuni, D. (2017). Penyajian Data, Analisis Data, dan Interpretasi. *Jurnal Unair*, 3(April), 49–58.

E. Sumber Online

Anonymous. (2015). Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0ea2c-1-laporan-lgbt-transgender-.pdf>

Anonymous. (n.d.). Tak Seorangpun Ingin Menjadi Transgender. Retrieved October 29, 2022, from https://ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/56/Tak-Seorang-Pun-Ingin-Menjadi-Transgender.html

Fathomi, A. (2016). Hak Asasi Manusia. <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hakasasi-manusia-ham.html>

Republika. (2016). “Majelis Agama Tolak LGBT.” Jakarta 19 Februari 2016, 1. <https://www.republika.co.id/berita/o2s8s713/majelis-agama-tolak-lgbt>

F. Hasil Wawancara

Drs. H. Kholid M.Si., Wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, 20 Juli 2023.

Herman Yoseph Singgih Sutoro, Pr., Wawancara, Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang, 13 Juni 2023.

Kadarwoko S.H., M.Hum., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, 7 Maret 2023.

Suryanto, S.H., M.Si., Wawancara, Bidang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 31 Maret 2023.

